TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Garuda, Moraref, Google Scholar, Base, dan OneSearch.

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i2

PENDIDIKAN TINGGI AGAMA ISLAM DAN KOHESI SOSIAL DI INDONESIA

Ojang Kosasih[1], Sutaryat T[2], Hanafiah[3]
Universitas Islam Nusantara Bandung
ojangks@gmail.com

Abstract

After the fall of authoritarian rule, religious people in Indonesia sought to improve relations through progressive Islamic education. Experts in this field study how community Islamic education leaders work to "renew" Islamic thought. They collected data between December 2005 and March 2006. The report examines the core values of education leaders as they seek to transform the State Institute of Islamic Studies into a true university. This study uses the tradition of promoting democracy through education as its basis. It further analyzes how this tradition has served as a foundation for teachers to promote cohesion in society and address social cohesion problems.

Keywords: *Islamic Education, Social Cohesion, Islamic Religion*

Abstrak: Setelah jatuhnya pemerintahan otoriter, umat beragama di Indonesia berupaya memperbaiki hubungan melalui pendidikan Islam progresif. Para ahli di bidang ini mempelajari bagaimana para pemimpin pendidikan Islam komunitas bekerja untuk "memperbaharui" pemikiran Islam. Mereka mengumpulkan data antara Desember 2005 dan Maret 2006. Laporan ini mengkaji nilai-nilai inti para pemimpin pendidikan saat mereka berusaha mengubah Institut Studi Islam Negeri menjadi universitas sejati. Studi ini menggunakan tradisi mempromosikan demokrasi melalui pendidikan sebagai basisnya. Ini menganalisis lebih lanjut bagaimana tradisi ini telah berfungsi sebagai landasan bagi para guru untuk mempromosikan kohesi dalam masyarakat dan mengatasi masalah kohesi sosial.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kohesi Sosial, Agama Islam

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi dan universitas secara signifikan mempengaruhi hubungan sosial. Sebagai salah satu jalur utama untuk mempengaruhi dalam masyarakat modern, pendidikan tinggi membawa para pemimpin masyarakat masa depan ke dalam kontak dekat satu sama lain selama tahap formatif kehidupan mereka. Untuk alasan ini saja, kebijakan yang mempengaruhi siapa yang diterima di universitas, siswa mana yang didorong untuk berhasil, dan seberapa cocok lingkungan kampus untuk berbagai segmen populasi berdampak pada hubungan antar-kelompok jauh di luar kampus gates. Namun, di luar pertanyaan tentang akses dan keragaman, isi pendidikan dan bagaimana penyampaiannya juga dapat membentuk interaksi antara kelompok sosial. Secara khusus, keputusan p olicy yang mempengaruhi relevansi sosial kurikulum, objektivitas keilmuan, dan norma-norma perdebatan akademik memiliki implikasi penting bagi negara-negara yang menderita konflik sosial (Kirana & Moordiningsih, 2010).

Studi ini mengkaji bagaimana perguruan tinggi dan universitas Islam negeri telah berusaha untuk mempengaruhi kohesi sosial di Indonesia, di mana bentrokan antar-komunal telah merusak transisi bangsa yang mengesankan dari pemerintahan otoriter selama dekade last . Para pendidik terkemuka dari sektor pendidikan tinggi agama Islam negeri Indonesia telah memperkenalkan reformasi kurikuler yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam dialog tentang isu-isu yang mempengaruhi hubungan antar-kelompok. Mereka juga telah bergerak untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baiktentang bagaimana warga negara dapat berhubungan satu sama lain dalam konteks demokrasi pluralistik. Upaya-upaya ini merupakan perubahan besar dari kebijakan rezim sebelumnya untuk menekan pendidikan dan bentuk wacana publik lainnya tentang isu-isu yang mungkin mengobarkan gairah etnis, agama, ras atau antar-kelompok. Mereka juga bertentangan dengan pandangan beberapa konservatif Islam yang telah berusaha untuk mengecualikan minoritas dari pembuatan kebijakan publik dan mendominasi perdebatan tentang urusan sosial dan politik.

Karena Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia dan baru-baru ini mencapai perbedaan sebagai demokrasi terbesar ketiga, upaya untuk menjembatani teori demokrasi dan tradisi pemikiran Islam telah menjadi penting bagi stabilitas sosial. Sistem pendidikan tinggi agama Islam publik Indo nesia telah membedakan dirinya melalui beasiswa, pengajaran, dan penjangkauan publik di bidang ini. Namun, baru-baru ini, peran sosial sistem menjadi jelas. Melalui konsep dan pengembangan program pendidikan

kewarganegaraan baru yang dirancang untuk memperluas dia- logue antar-kelompok, keberhasilannya dalam meyakinkan sejumlah lembaga Islam untuk mengadopsi model kewarganegaraannya, dan komitmennya untuk mendukung pendekatan inklusif, objektif, dan rasional untuk mempelajari fenomena sosial termasuk studi tentang pendidikan tinggi agama Islam negeri telah menunjukkan peran penting yang dapat dimainkan perguruan tinggi dan universitas dalam mempromosikan kohesi sosial (Holid & Meilani, 2018).

METODE

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai inti para pemimpin pendidikan saat mereka berusaha mengubah Institut Studi Islam Negeri menjadi universitas sejati. Ini juga menggabungkan analisis literatur terkait pendidikan tinggi agama Islam. Penelitian ini mengkaji suatu bidang tertentu melalui membaca dan mempelajari berbagai dokumen dan data yang berkaitan dengannya, seperti artikel jurnal, entri ensiklopedia, dan informasi lain dari sumber-sumber terbitan. Ini dilengkapi dengan data dari situs web yang terkait dengan penelitian dan dari koleksi perpustakaan umum. Analisis data melibatkan pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan menghasilkan kesimpulan untuk sebuah artikel. Metode ini memungkinkan penulis untuk memberikan ide dan saran kepada para pendidik tentang bagaimana untuk selalu meningkatkan pendidikan tinggi agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan Otoritarianisme

Kohesi sosial dapat digambarkan sebagai kemampuan anggota masyarakat untuk menemukan solusi yang disepakati bersama untuk masalah yang mereka hadapi. (Rivera et al., 2019) menegaskan bahwa, selama era otoritarianisme, kohesi sosial di Asia Tenggara umumnya dianggap sebagai fungsi komitmen pemangku kepentingan terhadap tatanan sosial tertentu. Dia mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama tahun 1980-an dan 1990-an memungkinkanpemerintah Indonesia untuk merancang kebijakan sosial dan ekonomi untuk memaksimalkan dukungan kelompok konstituen, sambil menggunakan bentuk-bentuk kontrol sosial yang berat untuk meminimalkan perbedaan pendapat.

Kebijakan pendidikan tinggi Indonesia sebagian besar mencerminkan strategi ini sebelum reformasi saat ini. Di satu sisi, akses ke pendidikan tinggi diperluas ke anggota berbagai kelompok sosial agar pemerintah dapat mencapai basis dukungan yang luas. Namun, integrasi sosial sejati terhambat oleh kontrol kampus yang membuatnya hampir tidakmungkin bagi mahasiswa dan fakultas untuk mengatasi salah satu masalah sosial, politik, lingkungan, dan hak asasi manusia yang memengaruhi hubungan antar-komunal.

Alih-alih mengajari siswa bagaimana terlibat dalam debat sipil, di mana ketegangan antar-kelompok mungkin telah berkurang dan konflik yang membara menyebar, rezim sebelumnya melembagakan program pendidikan politik yang terdiri dari serangkaian kursus wajib tentang dasar-dasar Pancasila, ideologi nasional Indonesia. Tujuan keseluruhan dari Pendidikan Pancasila adalah untuk memberikan dasar integrasi sosial dan memajukan persatuan nasional. Namun, dalam praktiknya, pendidikan Pancasila dijadikan ujian kesetiaan. Akses ke perguruan tinggi, militer, layanan sipil, dan lembaga-lembaga lain umumnya bergantung, sebagian, pada kesediaan seseorang untuk merangkul cita-cita nasional.

Sepanjang sistem education, pihak berwenang menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila harus dianggap sebagai sumber bimbingan moral daripada kesempatan untuk menafsirkan Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang membahas masalah sosial cenderung monologis dan memusuhi kritik. Tujuannya tampaknya adalah untuk menempatkan ideologi nasional di luar ranah debat publik, sambil menggunakan wacana yang dikontrol ketat tentang Pancasila untuk melegitimasi pemerintah kebijakan. Hasil dari manipulasi usaha akademik ini adalah pendidikan Pancasila menjadi bentuk indoktrinasi ideologis yang melaluinya pemerintah menekan pemikiran kritis, membatasi pertukaran ide, dan pada akhirnya memiskinkan pemahamannya sendiri tentang dinamika sosial. Salah satu aspek yang paling merusak dari kontrol kampus adalah pelarangan OSIS terpilih. Hingga akhir 1970-an, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dengan cara kerja institusi demokrasi melalui keterlibatan dengan badan perwakilan di kampus. Di bawah kebijakan otoriter, siswa diizinkan untuk memilih pemimpin untuk mewakili mereka dalam departemen mereka, serta melalui senat di seluruh universitas. Pencalonan untuk posisi seperti itu, bagaimanapun, bergantung pada persetujuan pejabat universitas. Dengan cara ini, model konsensus pemerintahan diberlakukan pada kelompok mahasiswa, sementara kemampuan untuk bereksperimen dengan pengambilan keputusan yang demokratis adalah Dihilangkan.

Ketika dominasi negara terhadap sektor ekonomi, politik, dan sosial menjadi ciri khas rezim sebelumnya pada 1990-an, oposisi mahasiswa terhadap pembatasan kampus tumbuh. Tidak lama setelah krisis ekonomi Asia, kekecewaan yang meluas terhadap pemerintah menjadi jelas. Runtuhnya mata uang Indonesia pada awal 1998 menyebabkan meletusnya gerakan protes nasional yang dipimpin mahasiswa yang menyerukan pemulihan hak-hak dasar dan mengakhiri monopoli kekuasaan elit penguasa. Demonstrasi mencapai klimaks dengan pengambilalihan parlemen nasional oleh mahasiswa, pengunduran diri paksa Presiden Soeharto, dan pengalihan kekuasaan kepada Wakil Presiden, B. J. Habibie, pada 21 Mei 1998. Namun, protes mahasiswa berlanjut hingga November, ketika parlia- ment Indonesia secara resmi setuju untuk mengadakan pemilihan nasional yang demokratis pada tahun berikutnya.

Indonesia telah membuat kemajuan signifikan menuju pelembagaan demokrasi sejak 1998. Reformis telah melakukan perombakan total sistem pemilu. Negara ini telah melakukan dua pemilihan nasional (pada tahun 1999 dan 2004) dengan tingkat partisipasi par- dan kepuasan pemilih yang tinggi. Sejak 2005, pemilihan langsung telahdilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, yang mengakibatkan meluasnya praktik demokrasi di mana pemilih meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah.

Terlepas dari keberhasilan ini, upaya untuk mencapai jenis ekonomi yang mungkin mengarah pada stabilitas jangka panjang telah terhambat oleh ketegangan yang sedang berlangsung di antara berbagai komunitas religius. Antara tahun 1998 dan 2003, lebih dari 10.000 orang tewas dan ratusan ribu orang mengungsi dalam konflik antara kelompok Kristen dan Muslim di banyak bagian Indonesia timur. Kekerasan itu sangat merusak hubungan antara komunitas agama di seluruh negeri dan mendorong proliferasi militansi Islam. Kelompok ekstremis yang mempromosikan kepentingan sektarian Islam kemudian mampu mencapai tingkat paparan dan pengaruh yang tinggi. Meskipun letusan besar kekerasan antar-religioAS dipadamkan setelah Kesepakatan Perdamaian Malino pada tahun 2001 dan 2003, harmoni sosial—juga karena daya tarik Indonesia bagi investor asing—terus dipengaruhi oleh propa- gasi retorika intoleran dan kegigihan kekerasan agama.

Pada Juni 2005, misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan *fatwa*, atau pendapat agama, yang mengutuk Ahmadiyah, sekte kecil atau cabang Islam yang telah bertahan selama lebih dari satu abad di kepulauan Indonesia. Dalam sebulan, anggota kelompok milisi Islam yang dikenal sebagai Front Pembela Islam (FPI) mulai melancarkan

serangan terhadap fasilitas Ahmadiyah di Jawa Barat. Mereka akhirnya berhasil menghancurkan markas jemaah Ahmadiyah di dekat kota Bogor serta sejumlah masjid Ahmadiyah di bagian lain provinsi tersebut. Pihak berwenang tidak menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, sebaliknya menanggapi dengan secara resmi melarang Ahmadiyah di distrik tersebut. Mengingat impunitas yang dinikmati oleh para pelaku dan success dari upaya mereka, tidak mengherankan bahwa serangan serupa dilakukan terhadap pengikut Ahmadiyah di pulau Lombok pada tahun 2006.

Milisi Islam juga mencoba mengintimidasi kelompok-kelompok Muslim yang telah mempromosikan pendekatan alternatif terhadap pemikiran Islam. Setelah *fatwa* MUI lainnya secara eksplisit mengutuk "liberalisme, pluralisme, dan sekularisme" pada tahun 2005, truk-truk berisi anggota milisi mengeluarkan ancaman di depan kantor Jaringan Islam Liberal, sebuah organisasi masyarakat sipil Islam yang didirikan oleh lulusan universitas Islam. Sementara MUI melakukan sedikit upaya untuk mendefinisikan istilah-istilah ini, kecaman mereka berfungsi sebagai dalih bagi militan yang berusaha menghilangkan oposisi terhadap upaya mereka untuk secara paksa memaksakan interpretasi konservatif tentang Islam pada penduduk Indonesia.

Seperti yang ditunjukkan oleh insiden-insiden ini, ada hubungan langsung antara retorika intoleran dan kekerasan agama. Kegagalan Indonesia untuk menambahkekerasan menunjukkan prob- lem serius dalam sektor hukum dan keamanannya. Namun, ketidakmampuan kelompok masyarakat sipil Indonesia untuk secara efektif melawan ekspresi intoleransi agama menunjukkan masalah dalam pendidikan. Sementara analisis kegagalan pendidikan rezim sebelumnya sangat membantu untuk memahami masalah ini, pertanyaannya tetap tentang peran apa yang dapat dimainkan perguruan tinggi dan universitas dalam mendukung pengembangan yang lebih toleran dan inklusif masyarakat.

Universitas Islam Dan Kohesi Sosial

Sejak periode perjuangan kemerdekaan Indonesia pada pertengahan 1940-an, pendidikan tinggi agama Islam yang dikelola pemerintah telah mempertahankan posisi yang signifikan dalam sistem universitas yang berkembang pesat di negara ini. Setelah berkembang melalui several early configura- tions, sistem ini saat ini terdiri dari enam Universitas Islam Nasional (UIN), sembilan perguruan tinggi otonom, empat tahun, yang dikenal sebagai Institut Negara untuk Studi Islam (IAIN), dan 32 lembaga studi Islam pemberi gelar lainnya

(STAIN) yang tersebar di pulau-pulau besar nusantara. Didanai melalui Kementerian Agama, sistem ini memberikan alternatif Islam untuk lembaga pendidikan tinggi sekuler yang didukung oleh Departemen Pendidikan, serta counterbalance ke berbagai lembaga Islam swasta yang dioperasikan oleh berbagai kelompok Muslim.

Dengan sekitar 150.000 mahasiswa atau 18% dari seluruh mahasiswa negeri, pendidikan tinggi agama Islam yang dikelola negara memiliki pengaruh yang cukup besar dalam society Indonesia. Dampaknya dirasakan dalam tiga cara penting. Pertama, perguruan tinggi dan universitas Islam menyiapkan guru studi Islam untuk sekolah umum bangsa, di mana kursus dasar tentang Islam wajib untuk semua siswa Muslim. Kedua, lulusan sering bekerja di pesantren tradisional yang menjamur di perdesaan. Ketiga, pendidikan tinggi negeri Islam berperan konsekuen dalam penyusunan ulama yang memberikan kepemimpinan di masjid-masjid di seluruh tanah air. Mengingat pengaruh sektor yang sangat besar, cara di mana ia menafsirkan ajaran-ajaran Islam, cara di mana ia membahas perdebatan tentang masalah-masalah Islam, dan nilai-nilai yang dipilihnyauntuk dipromosikan memiliki relevansi khusus dengan kohesi sosial.

Pengaruh pendidikan tinggi terhadap kohesi sosial sering digambarkan dalam hal modal sosial. Sehubungan dengan sistem pendidikan tinggi agama Islam Indonesia, dua bentuk utama modal sosial relevan. Pertama, perguruan tinggi dan universitas Islam menyediakan akses bagi puluhan ribu santri pesantren yang seharusnya tidak dapat mengikuti lembaga pendidikan tinggi. Meskipun tidak bergengsi seperti beberapa lembaga sekuler bangsa, perguruan tinggi dan universitas Islam menawarkan siswa kesempatan sederhana untuk mobilitas sosial. Dengan cara ini, mereka membantu mengintegrasikan masyarakat pedesaan dengan pasar dan negara, sebuah fenomena yang digambarkan sebagai modal sosial vertikal.

Sejumlah penelitian telah menekankan pentingnya menyeimbangkan berbagai kepentingan kelompok dalam konteks kebijakan yang mempengaruhi akses universitas dan keberhasilan mahasiswa. Misalnya, analisis (Crouch, 2002) tentang kebijakan tindakan afirmatif M alaysia yang relatif sukses memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang bagaimana perguruan tinggi dan universitas dapat membantu menyeimbangkan kepentingan etnis dalam masyarakat yang beragam. Prestasi Malaysia dapat dikontraskan dengan pengalaman Sri Lanka, di mana upaya yang kurang seimbang untuk memperbaiki ketidaksetaraan sosial memiliki efek bencana pada hubungan antar-komunal.

Bentuk modal sosial kedua yang dibantu oleh pendidikan tinggi agama Islam adalah modal sosial hori- zontal, yang mengacu pada sifat dan kekuatan relatif ikatan sosial keduanya di dalam dan di antara komunitas. Karena muslim muslim dari berbagai latar belakang berbagi pengalaman yang sama di kampus-kampus universitas Islam publik, lembaga-lembaga tersebut bertindak untuk menjembatani berbagai aliran Islam. Afiliasi dengan salah satu organisasi Islam besar di Indonesia dihindari setidaknya berkenaan dengan penafsiran ajaran Islam dan kurikulum yang diikuti. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut memainkan peran penting dalam membangun kohesi dalam masyarakat Muslim Indo-nesia , yang mewakili antara 85% dan 90% dari populasi umum. Seperti yang telah dijelaskan orang lain, modal sosial tidak selalu 'baik' untuk kohesi sosial. Misalnya, jika sebuah lembaga Islam memupuk modal sosial *ikatan* tingkat tinggi, atau kepercayaan, di antara berbagai kelompok Muslim, tetapi menciptakan ketidakpercayaan di antara umat Islam dan non-Muslim, kohesi sosial kemungkinan akan menghalangimakan. Untuk ini alasannya , karakter lembaga itu sendiri sangat penting.

Karena sangat sedikit non-Muslim yang hadir di kampus-kampus Islam Indonesia, insti-tutions memiliki kekurangan yang melekat dalam hal kemampuan mereka untuk menjembatani komunitas Muslim dan non-Muslim. Namun demikian, beberapa perguruan tinggi dan universitas Islam telah menginisiasi atau telah membantu mempertahankan upaya yang lebih luas untuk membangun hubungan di antara berbagai komunitas yang tidak bermoral. Dengan mempromosikan keterlibatan mahasiswa dan fakultas dalam kegiatan yang menyatukan anggota kelompok agama yang berbeda, institusi secara sadar berusaha untuk menciptakan jenis "jaringan keterlibatan" yang cenderung memperkuat hubungan antar-kelompok secara lebih luas di masyarakat. Hubungan semacam itu, sering disebut sebagai *menjembatani* modal sosial horizontal, dapat membuat masyarakat lebih kohesif dengan menciptakan tingkat kepercayaan antar-komunal yang lebih tinggi serta jalan kerja sama di mana upaya pengelolaan konflik dapat dilanjutkan jika terjadi krisis.

(Rivera et al., 2019) menegaskan bahwa di luar konsep modal sosial, masyarakat yang kohesif cenderung memiliki dua fitur lain: (1) Mekanisme kontrol sosial yang efektif seperti yang disediakan oleh pasukan keamanan yang andal dan sistem hukum yang berfungsi, dan (2) lembaga yang menyediakan "saluran sosialisasi yang memperkuat" yang diperlukan untuk forma- tion nilai-nilai bersama (hal. 13).

Dalam hal mempengaruhi mekanisme kontrol sosial, para intelektual yang terkait dengan universitas-universitas Islam—seperti rekan-rekan mereka di lembaga-lembaga sekuler—memainkan peran penting dalam mengkritik kebijakan publik. Berbagai lembaga penelitian dan organisasi sipil kecil yang bermunculan di dalam dan di sekitar kampus universitas Islam telah membantu memusatkan perhatian pada sumber-sumber konflik potensial seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidaksetaraan dalam representasi politik. Univers Islam publikjuga telah memperluas kemampuan mereka untuk melakukan penelitian sosial untuk mempengaruhi bagaimana konflik sosial dipahami, ditafsirkan, dan ditangani.

Seperti yang dijelaskan (Mathews & MacLeod, 2005), perguruan tinggi dapat membantu masyarakat di tengah konflik dengan menganalisis dan membingkai parameter konflik sehingga isu-isu tertentu dapat lebih dipahami dan solusi yang efektif mungkin lebih mudah ditemukan. Seperti yang telah diamati dalam konflik di seluruh dunia, bentrokan antar-kelompok di tingkat lokal dapat berubah menjadi bencana hak asasi manusia besar ketika sektor hukum, keamanan, atau pemerintahan telah rusak pada tingkat administrasi yang lebih tinggi. Akademisi tidak dapat mengisi kesenjangan seperti itu, tetapi mereka dapat menarik perhatian pada sumber-sumber konflik dan menyoroti masalah dengan badan-badan yang bertanggung jawab untuk manajemen konflik.

Cara lain di mana perguruan tinggi dan universitas Islam mempengaruhi cohesi sosial adalah dengan membantu membangun saluran sosialisasi yang memperkuat yang diperlukan untuk pembentukan nilai-nilai bersama dalam suatu masyarakat. Institusi pembelajaran tingkat tinggi berfungsi sebagai saluran penting di mana nilai-nilai sosial dapat ditularkan kepada generasi muda. Meskipun perlakuan teoritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dapat membantu, fungsi implisit universitas sebagai lembaga acculturation kemungkinan lebih penting. Untuk alasan ini, bagaimana fakultas menangani pendidikan tentang masalah sosial yang sensitif, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan akademik ditangani oleh institusi, dan bagaimana norma-norma debat ilmiah diputuskan dan ditegakkan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai-nilai yang dipelajari siswa untuk dipahami dan dihargai selama pengalaman kuliah mereka.

Nilai-Nilai Intelektual

Sejak perluasan pendidikan secara umum pada tahun 1960-an, para pemimpin sistem pendidikan tinggi agama Islam publik Indonesia secara bertahap menerapkan kebijakan yang dirancang untuk mengintegrasikan disiplin ilmu sekuler dengan studi tradisional teologi, budaya, dan hukum Islam. Central terhadap upaya ini telah menjadi pelukan dari apa yang disebut (Dhofier, 1992), mantan rektor IAIN-Semarang, sebagai *intelektualisasi* Muslim—penilaian ulang kritis terhadap doktrin agama dan interpretasi teologis sebelumnya dalam upaya untuk meningkatkan relevansi sosial Islam mengingat tantangan modernitas. Aktualisasi tujuan ini dalam sistem pendidikan tinggi agama Islam mencerminkan keyakinan banyak intelektual Muslim pr ogres- sive bahwa ilmu-ilmu Islam dan disiplin Barat dapat diinformasikan secara timbal balik dan ditingkatkan melalui lebih dekat tukar.

Fazlur Rahman dari University of Chicago, yang ikut mengarahkan proyek Pendidikan Islam Ford Foundation pada akhir 1970-an, berpengaruh dalam mempromosikan ide-ide ini di kalangan mahasiswa Indonesia. (Darlis, 2017) menegaskan bahwa hakikat pendidikan tinggi agama Islam bukanlah "... instrumen pengajaran seperti buku-buku yang diajarkan atau struktur pendidikan eksternal...," melainkan, apa yang disebutnya "intelektualisme Islam." Dia berpendapat bahwa pertumbuhan pemikiran Islam yang "asli, orisinal, dan memadailah yang harus memberikan kriteria nyata untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan Islam". Untuk itu, Rahman berpendapat, pendidikan tinggi agama Islam harus mengembangkan dan mempertahankan lingkungan di mana Islam dapat dikontekstualisasikan dan terus-menerus ditafsirkan ulang oleh setiap generasi Muslim yang berturut-turut.

Di dalam perguruan tinggi dan universitas Islam di Indonesia, dukungan terhadap perspektif ini dibuktikan dengan munculnya wacana produktif yang diarahkan pada penilaian ulang masalah pribadi dan sosial agama. Para cendekiawan Islam dan leaders pendidikan telah memainkan peran sentral dalam upaya mendamaikan aspek-aspek perubahan masyarakat dengan nilai-nilai tradisional budaya Islam (Hefner, 2020). Melalui analisis introspektif nilai-nilai inti yang dibagikan di seluruh negeri, dan dengan bereksperimen dengan akomodasi pengaruh eksternal, pendekatan progresif untuk studi Islam telah muncul pada sejumlah Islam kampus universitas. Intelektualisme Islam, yang dapat diartikan sebagai keterbukaan terhadap reinterpretasi atau kontekstualisasi Islam

meskipunt, dengan demikian dapat dianggap sebagai salah satu nilai utama yang menghidupkan perguruan tinggi dan universitas Islam negeri Indonesia.

Nilai kedua yang terkait dengan pendidikan tinggi agama Islam publik adalah antusiasme untuk penyelidikan kritis. (Padmo, 2012) mengidentifikasi dua pendekatan dasar untuk memperoleh pengetahuan 'modern' yang telah digunakan oleh para pemikir Muslim. Pendekatan pertama menyatakan bahwa keterlibatan dengan disiplin sekuler terbatas pada bidang teknologi murni. Yang kedua berpendapat bahwa umat Islam harus mengejar semua bidang studi, dan menerima tidak hanya teknologi Barat, tetapi juga metode penyelidikan dan analisis sosialnya.

Muslim Indonesia telah lama terpecah di sepanjang garis patahan filosofis ini. Universities yang dioperasikan secara pribadi oleh Muhammadiyah sebuah organisasi Muslim 'modernis' beranggotakan 28 juta orang yang didirikan pada tahun 1912 umumnya menganut strategi pertama dengan emp hasis merekapada pelatihan teknis. Disisi lain, para pemimpin pendidikan yang terkait dengan universitas Islam negeri cenderung menganut pendekatan yang terakhir.

Intelektual Muslim Indonesia terkemuka seperti Nurcholish Madjid dan Harun Nasution yang bermarkas di IAIN di Jakarta, dan mantan Menteri Agama, Abdul Mukti Ali dan Munawir Sjadzali, adalah kekuatan utama untuk perubahan kelembagaan dalam sistem pendidikan tinggi agama Islam selama tiga dekade terakhir. Kebijakan mereka untuk mendorong integrasi disiplin sekuler ke dalam studi Islam didasarkan pada pengamatan bahwa Muslim awal Abad Pertengahan mendominasi Eurasia secara intelektual sementara tidak membuat pemisahan antara pengetahuan agama dan sekuler. Mereka berpendapat bahwa karena semua pengetahuan dapat dianggap termasuk dalam pemeliharaan ilahi, maka semua bidang dan disiplin ilmu dapat dianggap sesuai untuk umat Islam. Berdasarkan alasan ini mereka mendorong pertukaran mahasiswa dan fakultas dengan universitas-universitas Barat, dan memperluas penawaran curricular dengan memperkenalkan berbagai studi ke dalam sistem IAIN.

Para pemimpin saat ini telah membangun reputasi keterbukaan ini dan telah menekankan pentingnya memahami metodologi ilmu sosial yang dikembangkan di Barat. Terlepas dari kritik bermusuhan yang disuarakan oleh kaum konservatif yang memandang tradisi intelektual Barat sebagai ancaman bagi otoritas agama, para pemimpin pendidikan tinggi agama Islam publik tidak malu-malu menjalin hubungan dengan universitas-universitas

Barat dan umumnya berusaha untuk mempromosikan pemahaman kritis pertanyaan di antara mahasiswa dan fakultas.

Para pemimpin pendidikan tinggi agama Islam publik telah menjelaskan bahwa mereka memperlakukan Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai "fenomena sejarah yang telah berkembang dan telah disesuaikan denganmasyarakat dan budaya manusia dan yang dapat menjadi sasaran analisis empiris... Pendekatan empiris, bukan emosional, normatif, atau ideologis ditekankan. Eksklusivitas dan agresivitas, ortodoksi yang kaku, dan melayani peran apologis atau missionary menjadi tidak pantas" (Azra, 2005).

Nilai lain yang ditekankan oleh sektor pendidikan tinggi agama Islam adalah toleransi terhadap tradisi agama lain serta interpretasi lain dari Islam. Pendidik di pemimpin bangsa Universitas Islam telah mempromosikan pendekatan inklusif untuk analisis masalah agama. Untuk alasan ini, perguruan tinggi dan universitas Islam sering menekankan pentingnya dialog di antara kelompok-kelompok agama dan mendorong siswa dan staf untuk mengambil peran kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog antar kelompok dalam konflik over masalah agama.

Dalam merefleksikan peran intelektual agama, Azyumardi Azra, Rektor UIN Jakarta, mengemukakan bahwa ada dua masalah mendasar yang terkait dengan dialogue antar kelompok agama: Ketidaksesuaian doktrinal yang menghalangi kesepakatan tentang isu-isu tertentu, dan peristiwa sejarah seperti perang dan jenis konflik lainnya yang mengakibatkan tegang hubungan antara penganut berbagai agama. Azra berpendapat bahwafungsi agama-aries—mereka yang terlibat dalam agama dalam semacam kapasitas resmi atau profesional—biasanya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang potensi kompatibilitas antar agama, serta kesadaran akan ents preced historis untuk hidup berdampingan secara damai. Namun, ia mengamati bahwa banyak fungsionaris agama melihat diri mereka secara ketat sebagai "penjaga iman" dan umumnya memilih untuk menekankan aspek-aspek yang tidak sesuai dari tradisi agama masing-masing. Untuk itu, ia berpendapat, meskipun fungsionaris agama biasanya lebih siap untuk membahas isu-isu antar-agama , tugas memfasilitasi dialog antar-agama seringkali jatuh kepada praktisi awam. Azra dengan demikian menegaskan bahwa itu adalah peran calon intelektual tidak hanya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang agama mereka dan berbagi wawasan mereka dengan penganut yang kurang dipelajari, tetapi juga untuk terlibat dalam

dialog dengan orang-orang dari agama lain, dengan kebaikan semua umat manusia dalam pikiran.

Peran Sosial Yang Lebih Luas

Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakan terhadap pendidikan tinggi agama Islam yang dapat digambarkan sebagai pengabaian jinak. Sementara lembaga-lembaga tersebut tidak diberi dukungan keuangan yang hampir sebanyak universitas negeri yang berafiliasi dengan Departemen Pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan mereka terjadi dengan gangguan politik yang agak kurang. Untuk itu, banyak bermunculan organisasi masyarakat sipil di sekitar kampus-kampus universitas Islam. Sebagai sinergi penting yang dikembangkan antara intellectuals Islam, aktivis LSM, dan kelompok mahasiswa pro-demokrasi yang baru lahir, ide-ide yang terkait dengan pembaruan Islam (*pembaruan*) memainkan peran yang cukup besar dalam perdebatan tentang masa depan Indonesia(KDKJ).

Sejumlah jurnal berorientasi Islam yang bertema masyarakat sipil mendapat dukungan universitas Islam pada 1990-an. Beberapa pusat penelitian mulai melakukan penelitian empiris tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan Islam dan demokrasi. Klub belajar yang mendorong siswa untuk menulis tentang demokratisasi dan berbagai masalah sosial yang berkembang pesat. Pada akhir 1990-an, ketika generasi baru intelektual progresif mulai mengambil posisi kepemimpinan di dalam Departemen Agama, sektor pendidikan tinggi agama Islam sangat siap untuk memperluas peran sosialnya .

Pada tanggal 19 Mei 1998, Menteri Agama Indonesia mengajukan permintaan resmi kepada pejabat senior pemerintah yang meminta kesepakatan dengan rencana untuk mengembangkan studi ilmu sosial bersama dengan disiplin studi agama tradisional di dalam tiga Institut Negara Studi Islam yang paling terkemuka di negara ini . Gagasan tersebut dipresentasikan sebagai langkah menuju persiapan seluruh sistem pendidikan tinggi agama Islam publik untuk menghadapi tantangan masa depan dengan mengubah "lembaga penuntun" di kota Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung menjadi universitas sejati. Sementara gagasan itu telah diperdebatkan selama beberapa tahun di kalangan intelektual, keputusan Kementerian untuk memajukan proposal saat ini — dua beberapa hari sebelum res ignation Presiden Soeharto—mengungkapkan pandangan ke depan dan antusiasme yang dengannya para pemimpin pendidikan tinggi Muslim progresif memanfaatkan momentum reformasi

untuk mempengaruhi perubahan dalam sektor mereka saat pemerintahan otoriter mulai runtuh. Langkah ini juga memberikan indikasi awal tentang betapa revolusionernya gagasan universitas Islam di kalangan Muslim Indonesia.

Ketika otoritarianisme runtuh, kepemimpinan progresif sektor pendidikan tinggi agama Islam Indonesia bergerak cepat untuk mengkomunikasikan ide-ide tentang reformasi pendidikan . Azyumardi Azra, yang menjadi Rektor IAIN Jakarta segera setelah kejatuhan Soehart, mulai berbicara tentang model alternatif pendidikan politik di awal masa reformasi. (Azra, 2005) mengutip dua alasan perubahan: Pertama, gaya otoriter pendidikan politik, yang menekankan indoktrinasi dan resimen, sudah ketinggalan zaman dalam konteks demokrasi baru Indonesia. Kedua, dosen-dosen yang tidak memiliki otoritarianisme cenderung menggunakan teknik pengajaran non-partisipatif yang merusak pemikiran kritis. Azra mengusulkan untuk mengembangkan model baru pendidikan kewarganegaraan di UIN Jakarta. Sejak awal, ia berharap bahwa kursus pendidikan Pancasila would digantikan oleh model pendidikan kewarganegaraan baru, yang dirancang untuk mempersiapkan generasi penerus Indonesia untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang plu- ralistik dan demokratis. Namun, Azra bersikeras bahwa kursus semacam itu hanya dapat dikembangkan melalui pendekatan inklusif dan bottom-up terhadap ide tersebut.

Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta mulai mengembangkan program percontohan pada tahun 2000. Pusat ini mengambil pendekatan partisipatif dengan melibatkan banyak fakultas dan mahasiswa dalam proses perencanaan dan evaluasi kursus. Bahkan, para pemimpin universitas mengumpulkan lebih dari 200 pemimpin mahasiswa yang mewakili 46 institusi di seluruh negeri untuk membahas gagasan tersebut sebelum menyelesaikan rencana untuk program percontohan nasional. Mereka juga mengadakan forum yang melibatkan pendidik dari berbagai institusi di luar sistem universitas Islam dan merekrut talenta dari seluruh negeri untuk mengembangkan teks kursus. Sebagai hasil dari upaya-upaya ini, cours e sipil menghadapi sedikit perlawanan.

Dengan dana dari Asia Foundation dan donor internasional lainnya, IAIN Jakarta kemudian mengembangkan kurikulum formal, menerbitkan buku teks dan bahan ajar lainnya, dan memberikan pelatihan bagi instruktur kursus. Kursus ini kemudian diajarkan di 46 dari 47 lembaga pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia, dimulai pada September 2001. Tahun berikutnya, setelah evaluasi menyeluruh, Kementerian Agama menjadikan

pendidikan kewarganegaraan sebagai kompensasi bagi semua siswa yang terdaftar di pendidikan tinggi agama Islam negeri.

Jauh dari pandangan stereotip pendidikan Islam sebagai tradisi stagnan yang ditandai dengan teknik pengajaran yang ketinggalan zaman dan kurikulum yang tidak relevan, upaya pendidikan kewarganegaraan ini telahmenghasilkan pedagogi pembelajaran aktif yang dirancang untuk melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan demokratis dan merangsang pemikiran kritis tentang masalah sosial. Karena model pendidikan kewarganegaraan ini telah menggantikan kursus indoktrinasi ideologis rezim sebelumnya di campuses di seluruh negeri, itu telah menjadi salah satu fitur utama dari proses demokratisasi di dunia paling banyak masyarakat Muslim yang padat penduduk (Darlis, 2017).

Sejumlah perguruan tinggi dan universitas Islam swasta kemudian mengadopsi pro-gramme. Yang paling penting, sistem pendidikan tinggi Muhammadiyah, yang mengoperasikan lebih dari seratus perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri, menghabiskan waktu berbulan-bulan mengamati program universitas Islam negeri sebelum mengembangkan pendidikan kewarganegaraannya sendiri berdasarkan model itu. Itu juga bereksperimen dengan program percontohan, mengembangkan materi kursusnya sendiri, dan kemudian memperluas program dalam jaringan institusinya. Secara keseluruhan, setelah lima tahun ekspansi, kursus pendidikan kewarganegaraan telah berkembang jauh melampaui batas-batas komunitas pendidikan tinggi agama Islam publik. Saat ini, lebih dari 100.000 stu- penyok per tahun dari beberapa jaringan pendidikan tinggi agama Islam terdaftar di beberapa versi kursus pendidikan kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Mengingat politisasi isu-isu agama dan kecenderungan konflik sosial untuk mengambil nuansa agama di Indonesia, fakta bahwa para pendidik di sebuah lembaga studi Islam memberikan kepemimpinan untuk mengubah hakikat pendidikan politik di seluruh negeri adalah signifikan. Selain itu, adopsi luas model pendidikan kewarganegaraan yang mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalamdemokrasi plu ralistik menggarisbawahi sejauh mana demokratisasi telah dianut oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim.

Fakta-fakta ini menarik perhatian pada peran berpengaruh pemikiran Islam progresif dalam sektor pendidikan tinggi publik. Seandainya nilai-nilai intelektualisme, inkuiri kritis, keilmuan objektif, toleransi, dan rasionalisme tidak dipupuk dalam disiplin ilmu studi Isl amic di Indonesia, tampaknya tidak mungkin sektor pendidikan tinggi agama Islam akan menghasilkan kepemimpinan dinamis yang sama yang bertekad untuk meningkatkan kohesi sosial melalui program kewarganegaraan yang inovatif.

Meningkatnya tingkat keragaman dalam masyarakat di seluruh dunia menghadirkan tantangan mendasar bagi perguruan tinggi dan universitas: Bagaimana pendidikan tinggi, sebagai salah satu komponen utama masyarakat sipil, mempromosikan hubungan baik antara kelompok-kelompok sosial sambil melampiaskan pra-ventilasi asosiasi o f upaya seperti itu dengan kekuatan politik dan struktur kelas yang mencerminkan kesenjangan sosial? Kebangkitan integralisme agama dan etika dalam beberapa tahun terakhir menggarisbawahi keharusan ini. Pembuat kebijakan harus memutuskan bagaimana menanggapi ekstremis yang berusaha untuk memperdalamperpecahan antara kelompok-kelompok sosial baik di kampus maupun di masyarakat pada umumnya. Selain itu, untuk benar-benar meningkatkan kohesi sosial, pembuat kebijakan harus menginspirasi mereka yang memiliki akses ke pendidikan universitas untuk mengatasi kebutuhan dan kekhawatiran kelompok yang lebih terpinggirkan .

Keberhasilan sektor pendidikan tinggi agama Islam negeri Indonesia menggarisbawahi potensi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kohesi sosial. Namun, perlu dicatat bahwa pelembagaan pendidikan kewarganegaraan dibandingkan dengan sektor pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia telah bertepatan dengan pertumbuhan mencolok kelompok mahasiswa Islam konservatif di kampus-kampus di seluruh negeri. Dengan latar belakang ketegangan antar-agama yang sedang berlangsung , kampus-kampus universitas telah menjadi salah satusitus utama kontes- tation antara mereka yang mencari kesepakatan antar-kelompok dan mereka yang berusaha untuk meminggirkan kelompok minoritas demi interpretasi eksklusivisme dari nilai-nilai mayoritas. Meskipun para pendidik Islam di seluruh Indonesia sekarang berbicara tentang membangunketahanan antar kelompok sosial dengan mengekspos pemuda dari berbagai komunitas ke sudut pandang satu sama lain tentang masalah sosial yang relevan, masih belum jelas apakah pendidik sipil pada akhirnya akan berhasil dalam upaya mereka untuk memajukan toleransi, pluralisme, kesetaraan gender dan nilai-nilai masyarakat sipil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, A. (2005). Islam in Southeast Asia: Tolerance and Radicalism. *Miegunyah Public Lecture*, 1–19.

Crouch, H. W. (2002). The pre-dawn call of the white-plumed honeyeater (Lichenostomus penicullatus). In *South Australian Ornithologist* (Vol. 33, pp. 156–163).

Darlis, A. (2017). Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, *XXIV*(1), 91–93.

Dhofier, Z. (1992). The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia. *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter*, *20*(58), 19–31. https://doi.org/10.1080/03062849208729783

Hefner, R. W. (2020). *Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Vol. 21, Issue 1). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203

Holid, A., & Meilani, R. I. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja Sosial Terhadap Kinerja Karyawan Direktorat Akademik Di Sebuah Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, *3*(1), 201. https://doi.org/10.17509/jpm.v3i1.9456

Kirana, A., & Moordiningsih. (2010). Studi Korelasi Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dengan Prestasi Akademik : Telaah Pada Siswa Perguruan Tinggi. *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, *12*(1), 47–54.

Mathews, A., & MacLeod, C. (2005). Cognitive vulnerability to emotional disorders. *Annual Review of Clinical Psychology*, *1*(May), 167–195. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.143916

Padmo, S. (2012). Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia Dari Masa Ke Masa: Sebuah Pengantar. *Humaniora*, *19*(2), 151–160.

Rivera, M., Knickel, K., María Díaz-Puente, J., & Afonso, A. (2019). The Role of Social Capital in Agricultural and Rural Development:Lessons Learnt from Case Studies in Seven Countries. *Sociologia Ruralis*, *59*(1), 66–91. https://doi.org/10.1111/soru.12218